Apa yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak?: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

¹⁾Tegar Gigih Pratama
tegargigih31@gmail.com

²⁾Lulu Amalia Nusron
lulu.amalia@upy.ac.id

^{1,2)} Fakultas Bisnis, Prosa Akuntansi, Universitas PGRI Yogyakarta

Abstract: Research is conducted to know the influence of taxation understanding, self assessment system, tax rate, and justice to tax evasion action in the OPD of Bantul Regency. This study used the research population of employees in the OPD of Bantul regency who already had a NPWP. Samples took a number of 108 respondents. Sample research was taken using the purposive sampling method with the time period of study starting in October 2019. Analysis of research data using multiple linear regression using SPSS 23. Based on the results shows that understanding of taxation and justice affects on tax evasion. Meanwhile, the self assessment system and tax rates have no effect on tax evasion.

Keywords: understanding of taxation; self assessment system; tax rates; justice; tax evasion.

1. Pendahuluan

Indonesia termasuk dalam negara yang sedang berkembang, sehingga terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tentu bukan hal yang mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara. Pemerintah harus memberi fasilitas penunjang agar perekonomian dapat bertumbuh pesat dan berakibat pada peningkatan kesejahteraan. Salah satu sumber yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat adalah adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber terbesar bagi penerimaan negara namun Wajib Pajak (WP) sering mencari celah untuk memperoleh keuntungan. Wajib Pajak akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yaitu dengan melakukan penggelapan pajak dan penghindaran pajak, akan tetapi, penggelapan pajak lebih sering dilakukan karena dianggap paling mudah (Ismadiani dkk., 2019).

Seorang Wajib Pajak tergolong taat akan peraturan perpajakan, jika paham dan berupaya untuk memahami peraturan undang-undang perpajakan. Baik itu menghitung pajak, maupun melaporkan SPT serta melaporkan pajak pada saat membayar pungutan (Agustiningsih & Isroah, 2016). Wajib Pajak diharapkan memahami segala peraturan perpajakan sehingga memudahkan dalam melakukan pelaporan pajak. Pemahaman perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak pada aturan perpajakan, dalam hal ini status sosial juga berpengaruh terhadap pemahaman perpajakan karena semakin tinggi status sosial maka semakin tinggi juga pemahaman perpajakannya (Dharma dkk., 2016).

Suatu negara pasti mempunyai sistem pajak yang efektif karena dapat memberikan dampak penting terhadap pembangunan nasional. Hal ini dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk mengatasi ketergantungan terhadap pihak asing dan sumber daya alam (Fjeldstad, 2013). Saat ini Indonesia sedang mengaplikasikan *self assessment system*, merupakan metode yang mempermudah WP ketika melaporkan, mengkalkulasi, serta menyetor jumlah pajak yang terhutang (Surahman & Putra, 2018). *Self assessment system* adalah metode yang dikembangkan kantor pelayanan pajak untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan bantuan nasional secara bersama-sama untuk menghitung, menyetorkan dan menyampaikan jumlah pungutan yang mesti disetorkan (Siahaan, 2010).

Salah satu hal yang sangat penting bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar menentukan besar utang pajak pribadi atau badan. Pemerintah memiliki andil untuk menentukan tarif pada pajak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak. Penentuan tarif pada pajak haruslah adil guna menciptakan keseimbangan sosial. Penyebab penggelapan pajak salah satunya ialah tarif pajak yang tinggi, sehingga hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya (Kurniawati & Toly, 2014).

Salah satu motivasi WP dalam menyetorkan pajaknya adalah keadilan dalam menyetor jumlah pajak terutang karena dihitung menggunakan persentase tarif. Keadilan merupakan hal penting dalam pemungutan pajak, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaan. Kesejahteraan bisa tercapai jika pemerintah membuat kestabilan sosial dan keadilan (Yuliyanti *dkk.*, 2017). Kurniawati & Toly (2014) mengungkapkan bahwa besarnya biaya kepatuhan yang dibayar oleh Wajib Pajak akan mempengaruhi pada perlakuan atau tindakan patuh atau tidaknya seorang wajib pajak. Jika perhitungan pajak sudah dilakukan berdasarkan aturan dan dirasa masyarakat menerima dan sesuai dengan apa yang dikenakan dan tidak merasa terbebani, sehingga WP akan berpikir ulang ketika akan untuk berbuat melanggar hukum seperti melakukan *tax evasion*.

Penelitian yang dilakukan oleh Surahman & Putra (2018); Damayanti *et al.* (2017); Annisa'ul & Cahyonowati (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, *self assessment system*, tarif pajak, dan keadilan memberikan dampak pada persepsi *tax evasion*. Hasil riset yang ditemukan Friskianti & Handayani, (2014); Ardyaksa & Kiswanto (2014); Dewi & Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, *self assessment system*, tarif pajak, dan keadilan tidak memberikan dampak pada persepsi *tax evasion*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti belum bisa mendapatkan hasil yang konsisten dan terdapat banyak penelitian yang menggunakan responden Wajib Pajak non PNS (Mustofa, 2016; Dharma *et al.*, 2016; Utami & Helmy, 2016; Purwanto *et al.*, 2018). Penelitian ini berusaha meneliti kembali persepsi Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak dengan responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena responden tersebut memperoleh gaji dari pemerintah sehingga diharapkan memiliki persepsi yang berbeda berkaitan dengan kepatuhan dan penggelapan pajak. Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang kemungkinan dapat memberikan dampak pada persepsi PNS tentang adanya perilaku *tax evasion*.

2. Landasan Teori & Pengembangan Hipotesis

2.1. Landasan Teori

Pajak merupakan kewajiban yang mengikat warga negara yang sudah memenuhi persyaratan yang berlaku dalam undang-undang untuk membayar iuran yang disetorkan ke pendapatan negara akan tetapi bersifat wajib dan tidak secara langsung mendapatkan *feedback* (Waluyo, 2011). Terdapat dua manfaat pajak, pertama yakni penerima (*budgetair*) adalah menghimpun uang melalui warga guna menambah pendapatan negara, kemudian digunakan bagi mencukupi belanja Negara. Pajak ini digunakan sebagai anggaran untuk melaksanakan agenda negara secara teratur serta menjalankan pembangunan. Anggaran tersebut bisa didapatkan dari penerimaan pajak. Selanjutnya, manfaat yang kedua yakni mengatur (*regulerend*) adalah mengatur penataan pendapatan dan kekayaan antara masyarakat dan para pelaku ekonomi (Sumarsan, 2017).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perilaku yang menyimpang dari peraturan yang dibuat dan disepakati untuk tidak membayar pungutan atau tidak menyampaikan penghasilan yang diperolehnya secara utuh (Sumarsan, 2017). Usaha seseorang untuk memanipulasi atau tidak menyampaikan semua jumlah pajaknya secara ilegal dan berusaha untuk tidak menyetorkan punngutan sesuai peraturan yang telah dibuat dan disepakati disebut penggelapan pajak (Rahayu, 2010). Pemahaman Wajib Pajak merupakan siasat seseorang untuk mengerti aturan perpajakan yang sudah disahkan. Ketidaktaatan seseorang cenderung dikarenakan kurangnya pemahaman tentang peraturan yang selama ini dijalankan. Sebaliknya, seseorang yang mengerti tentang aturan maka akan menjalankannya, dan tahu akan mendapatkan sanksi jika melalaikan kewajibannya (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Pemahaman dalam konteks ini ialah mengetahui serta memahami ketentuan dalam pajak dan tahu cara penyampaian SPT yang benar, membayarkan, konter penyetoran, sanksi serta akhir waktu penyetoran (Putri & Setiawan, 2016).

2.2. Perumusan Hipotesis

Pemahaman Wajib Pajak terhadap aturan perpajakan ialah langkah seseorang untuk mendalami aturan terkait pungutan yang terdapat sebelumnya. Seseorang yang tidak mendalami aturan dalam pemungutan secara jelas, mungkin bisa masuk sebagai pelanggar dalam aturan. Semakin baik tingkat pendalaman seseorang terkait pajak maka akan membuat orang tersebut semakin taat terhadap aturan, begitu juga sebaliknya jika rendahnya pendalaman seseorang terkait pajak mengakibatkan lalai akan kewajibannya maka akan ada sanksi yang harus dihadapi (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Rachmadi & Zulaikha (2014) juga menjelaskan jika seseorang yang paham mengenai undang-undang pajak maka seharusnya mengaplikasikannya ketika membayar pajak. Wajib pajak akan menghindari tindakan penggelapan pajak dan perilaku tidak etis karena sudah mengerti dan memahami undang-undang perpajakan.

Penelitian terdahulu Surahman & Putra (2018); Dharma *et al.* (2016); Rachmadi & Zulaikha (2014) menyatakan bahwa dengan memahami perpajakan akan mempengaruhi tindakan *tax evasion*. WP banyak menggunakan keahliannya dalam perpajakan untuk

melakukan tindakan tax evasion (Marliana, 2018). Semakin paham seorang Wajib Pajak maka kemungkinan untuk menggelapkan pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Self assessment system adalah pola untuk memungut pajak yang menyerahkan segala kepercayaan, kuasa, dan tanggungan terhadap orang yang bersangkutan untuk menghitung, menyetorkan dan menyampaikan total pungutan yang mesti dibayarkannya (Wahyuni, 2011). *Self Assessment System* adalah satu cara dalam melakukan pungutan yang memberikan segala kewenangannya kepada orang yang bersangkutan untuk menjumlahkan pungutan yang mesti disetorkan (Mardiasmo, 2018). Indonesia telah menganut *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajaknya dengan harapan dapat menimbulkan kesadaran WP ketika melakukan ketika menyelesaikan kewajibannya. Namun, hal ini dapat menimbulkan tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tidak melaporkan pungutan pajak yang seharusnya. Selain itu, masih terdapat potensi masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Banyak masyarakat yang belum menjadi Wajib Pajak sehingga tidak menyampaikan SPT atau sudah menjadi WP tapi tidak menyampaikan SPT dengan benar. Beberapa WP juga berusaha bekerja sama dengan petugas pajak agar terhindar dari beban pajak. Oleh karena itu *self assessment system* yang baik akan mengurangi usaha WP melakukan *tax evasion*, begitu juga sebaliknya (Friskianti & Handayani, 2014).

Hasil penelitian dari Friskianti & Handayani (2014) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak memberikan dampak signifikan pada persepsi *tax evasion*. Namun beberapa penelitian lainnya yaitu Ismadiani *et al.* (2019); Purwanto *et al.* (2018); Damayanti *et al.* (2016) menyatakan bahwa *self assessment system* mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan temuan riset tersebut bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Self assessment system berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Tarif pajak adalah persentase total yang mesti disetorkan oleh Wajib Pajak yang besarnya ditentukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tarif pajak masuk ketetapan materiil dalam kesepakatan pungutan dengan orang yang bersangkutan dan objeknya. Pungutan terutang dihitung menggunakan keberadaan tarif pungutan (Ayu *et al.*, 2009). Tanggungan Wajib Pajak mengenai keputusan jumlah pajak yang mesti dibayarkan merupakan tarif pajak (Utami & Helmy, 2016). Tarif pajak ditetapkan berdasarkan keadilan dengan menggunakan presentase. Penghasilan akan berkurang setelah dikenakan pemotongan dari pajak atas penghasilan. Pajak yang dipungut tergantung dari tarif presentase dan berapa besar penghasilan yang dihasilkan. Hal ini juga akan mempengaruhi besaran pajak yang dipungut atau dipotong jika ada perubahan tarif. Perubahan tarif yang lebih besar akan membuat Wajib Pajak cenderung menjadi tidak patuh akan peraturan perpajakan sehingga WP akan berusaha meminimalkan beban pajak terutang yang dipungut atau dipotong. Oleh karena itu, tingkat penggelapan pajak akan berbanding lurus dengan besarnya tarif pajak yang terlalu tinggi. Wajib Pajak akan berusaha untuk menggelapkan

pajak jika tarif yang dirasakan terlalu tinggi dan memberatkan (Kurniawati & Toly, 2014).

Penelitian terdahulu Ardyaksa & Kiswanto (2014) membuktikan bahwa tarif pajak tidak memberikan dampak signifikan pada persepsi *tax evasion*. Namun beberapa peneliti lain seperti Kurniawati & Toly (2015); Permatasari & Laksito (2013); Salam & Rahim, (2016) berpendapat bahwa tarif pungutan mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diatas bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Pemerintah menerapkan prinsip keadilan pajak dalam sistem perpajakan agar tidak memberatkan Wajib Pajak. Masyarakat beranggapan jika pajak merupakan sesuatu yang memberatkan sehingga lalu perlu adanya jaminan untuk memperoleh keadilan dalam pemungutan serta pengenaan pajak oleh negara (Siahaan, 2010). Keadilan Pajak merupakan adil pada aturan yang telah dibuat dan dilegalkan diantaranya menyetarakan pungutan secara menyeluruh dan umum yang mungkin bisa diserasikan pada kapasitas orang yang bersangkutan. Pelaksanaan pajak dari pemerintah akan dirasa adil ketika wajib pajak mendapatkan hak untuk mengajukan rasa berat, melakukan penundaan dalam menyeter pajak, dan melakukan ajuan banding kepada MPR atau Majelis Pertimbangan Pajak (Mardiasmo, 2009). Pengenaan pajak yang merata dan menyesuaikan kemampuan masing-masing wajib pajak merupakan pelaksanaan pajak yang adil dalam Undang-Undang. Tentu wajib pajak akan merasa keberatan membayar pajak apabila ia tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Oleh karena itu, penggelapan pajak akan menjadi rendah ketika keadilan yang ditegakkan sangat tinggi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardi *et al.* (2016); Averti & Suryaputri (2018) menyatakan bahwa keadilan tidak memberikan dampak pada persepsi *tax evasion*. Namun beberapa peneliti seperti Annisa'ul & Cahyonowati (2014); Kurniawati & Toly (2014); Damayanti *et al.* (2017) menyatakan bahwa keadilan mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diatas bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional Variabel

Tindakan penggelapan pajak merupakan salah satu cara meminimalisasi beban terutang pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Penggelapan pajak dipraktikkan dengan pelanggaran peraturan perpajakan, sehingga dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan pendapatan Wajib Pajak (Safitri, 2018; Budiarto *et al.*, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur tindakan penggelapan pajak menurut Friskianti & Handayani (2014) dengan 6 pertanyaan yaitu waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT), keandalan Surat Pemberitahuan (SPT), dan tanggung jawab orang yang bersangkutan.

Pemahaman perpajakan merupakan pandangan Wajib Pajak mengenai pemahaman perpajakan berbentuk sistem perpajakan serta peraturan perpajakan. Orang yang

bersangkutan ini diwajibkan mengerti peraturan dan apa kewajiban yang harus dijalankan agar terlepas dari sanksi yang telah ditetapkan (Surahman & Putra, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011) terdiri dari 9 pertanyaan yaitu harus punya NPWP, paham dengan hak dan kewajiban perpajakan, paham terkait sanksi perpajakan, Wajib Pajak paham terhadap PTKP, PKP, dan tarif pajak, paham dengan SSP, faktur pajak, terdapat NPWP dalam Surat Pemberitahuan, paham dengan kode yang tertera di NPWP, serta paham terhadap peraturan perpajakan melalui sosialisasi.

Self Assessment System adalah pungutan pajak yang memberikan kuasa kepada Wajib Pajak dalam menjumlahkan sendiri besar pungutan yang belum terbayar (Mardiasmo, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur *self assessment system* menurut Friskianti & Handayani (2014) terdiri dari 4 pertanyaan yaitu mendaftar sebagai Wajib Pajak, menjumlahkan, membayar, dan lapor pungutannya.

Tarif pajak mesti ditentukan secara jelas agar orang yang bersangkutan bisa mudah dan paham terkait penentuan jumlah pungutan yang mesti disetorkan (Mustofa, 2016). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tarif pajak menurut Permatasari & Laksito (2013) terdiri dari 4 pertanyaan adalah prinsip kemampuan dalam menyetorkan pungutan, dan tarif pungutan yang sudah disepakati.

Keadilan Pajak adalah sebuah tindakan yang bisa memberikan dampak pemikiran orang yang bersangkutan. Pada teori atribusi, seseorang dapat menilai orang lain terkait gerak-gerik seseorang secara berbeda dengan situasi yang berbeda. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan kejelasan agar memperoleh perlakuan yang sama terkait besar pungutan oleh petugas. Jika Wajib Pajak memperoleh sesuatu yang sama dengan lainnya, maka tindakan penggelapan pajak bisa menurun sampai tindakan itu tidak ada lagi (Yuliyanti et al., 2017). Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel keadilan menurut Friskianti & Handayani (2014) terdiri dari 6 pertanyaan yaitu pungutan yang disetor mestinya sama dengan manfaat yang diterima dan pungutan sesuai kapasitas orang terkait dalam penyetorannya.

3.2. Populasi dan Sampel

Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung pada 25 OPD yang berada di Kabupaten Bantul. Teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan kriteria yaitu memiliki NPWP lebih dari 1 tahun dan minimal pendidikan SMA. Sampel yang didapatkan setelah memenuhi kriteria sebanyak 125 responden dan hanya 108 kuesioner yang dapat digunakan. Hasil distribusi kuesioner dijelaskan secara rinci pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	125 kuesioner
Kuesioner yang kembali	113 kuesioner
Kuesioner yang tidak kembali	12 kuesioner
Kuesioner yang dapat diolah	108 kuesioner
Kuesioner yang tidak dapat diolah	5 kuesioner

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kualitas atau valid tidaknya instrumen yang ada pada kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan suatu yang akan diukur. Pengujian validitas menggunakan *pearson correlation* dengan nilai signifikansi $< 5\%$ (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, pengujian kualitas data dilakukan pada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Tabel 2 merupakan contoh hasil pengujian validitas untuk variabel dependen penggelapan pajak. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen memiliki nilai *p value* $< 5\%$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pada variabel penggelapan pajak adalah valid. Untuk seluruh instrumen dalam variabel lainnya juga dinyatakan valid karena memiliki *p value* $< 0,05$.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation (r hitung)	Signifikasi	Keterangan
Penggelapan pajak (Y)	Y ₁	0,943	0,000**	Valid
	Y ₂	0,958	0,000**	Valid
	Y ₃	0,970	0,000**	Valid
	Y ₄	0,962	0,000**	Valid
	Y ₅	0,952	0,000**	Valid
	Y ₆	0,946	0,000**	Valid

Keterangan: ** sig $< 1\%$

4.2. Hasil Uji Reliabilitas

Tujuan uji reliabilitas untuk mengukur seberapa besar konsistensi pengukuran yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpha* (α), jika nilai *cronbach alpha* $> 0,6$ maka instrumen dapat dikatakan reliabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Alpha	Hasil
1	Pemahaman perpajakan (X ₁)	0,849	0,6	Reliabel
2	<i>Self assessment system</i> (X ₂)	0,873	0,6	Reliabel
3	Tarif pajak (X ₃)	0,762	0,6	Reliabel
4	Keadilan (X ₄)	0,951	0,6	Reliabel
5	Penggelapan pajak (Y)	0,981	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,849 lebih besar dari nilai cutoff yang ditentukan sebesar 0,6 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan adalah reliabel. Selain itu variabel *self assessment system*, tarif pajak, keadilan pajak dan persepsi penggelapan pajak memiliki nilai *cronbach alpha* masing-masing 0,873; 0,762; 0,951; 0,981 lebih besar dari standar yang ditetapkan yaitu 0,6 sehingga instrumen pada tiap variabel dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil pengujian data tersebut maka dapat dilanjutkan pada uji hipotesis untuk membuktikan dugaan sementara yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hipotesis diuji dengan analisis regresi berganda sehingga hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dibuktikan.

4.3. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Beta	t hitung	P value	Kesimpulan
(Constant)	2,804	0,580	0,563	
Pemahaman perpajakan	0,271	2,033	0,045*	H ₁ : terbukti
Self assessment system	-0,340	-1,463	0,146	H ₂ : tidak terbukti
Tarif pajak	-0,246	0,236	0,298	H ₃ : tidak terbukti
Keadilan	0,665	10,420	0,000**	H ₄ : didukung
F Hitung: 28,638			0,000**	
Adjusted R square: 0,508				

Keterangan: ** sig < 1%, * sig < 5%

Tabel 4 menunjukkan dampak tiap variabel independen pada variabel dependen dengan memperhatikan nilai *p value* dari tiap variabel. Variabel pemahaman perpajakan memiliki *p value* 0,045 (signifikan) hal ini berarti pemahaman perpajakan memberikan dampak yang signifikan pada persepsi *tax evasion*. Hasil ini mendukung riset sebelumnya yaitu Surahman & Putra (2018); Dharma *et al.* (2016); Rachmadi, (2014); dan Ardi *et al.* (2016). Berdasarkan teori persepsi, timbulnya pemikiran dipengaruhi oleh rangsangan, salah satunya pemahaman terhadap objek, pada konteks penelitian ini adalah pemahaman perpajakan. Seseorang akan menilai tidak baik dan tidak akan melakukan hal yang sifatnya berbenturan dengan aturan yang telah disepakati bila pengertian dan pemahamannya semakin bagus (Dharma *et al.*, 2016). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan, tata cara, atau prosedur dalam perpajakan yang baik, maka akan menghindari tindakan yang tidak etis seperti penggelapan pajak. Marliana (2018) juga menjelaskan bahwa wajib pajak yang memahami bahwa penggelapan pajak tersebut tidak boleh dilakukan lantaran wajib pajak telah memahami aturan perpajakan secara mutlak.

Variabel *self assessment system* memiliki *p value* sebesar 0,146 (tidak signifikan) hal ini berarti bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan pada persepsi penggelapan pajak. Hasil ini mendukung penelitian Friskianti & Handayani (2014). *Self assessment system* yang dilakukan sesuai dengan proses dan aturan yang benar dapat menghasilkan pendapatan negara yang optimal. Namun orang yang bersangkutan juga bisa mempunyai pandangan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan penggelapan pajak karena kebebasan dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajaknya (Damayanti *et al.*, 2017). Sistem asesmen yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak sebagai tuntutan agar wajib pajak mematuhi aturan secara sukarela dan atas dasar kesadaran diri sendiri. Tuntutan tersebut membuat wajib pajak berpikiran untuk tidak berbuat jujur dengan memanipulasi perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Untuk meminimalisir tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, tentu diperlukan adanya pemeriksaan pajak yang konsisten dan profesional berdasarkan aturan dan standar yang ada. Selain itu, perlu diterapkan hukuman atau sanksi yang lebih tegas sesuai aturan perundangan perpajakan. Kantor Pajak Pratama atau KPP perlu melakukan sosialisasi mengenai penjelasan pemeriksaan pajak serta hukuman untuk WP yang kurang mematuhi aturan. Salah satunya adalah dengan menerbitkan surat pemberitahuan, surat himbauan, surat teguran, atau pendekatan persuasif lainnya. Usaha tersebut dilakukan agar wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan (Purwanto *et al.*, 2018).

Variabel tarif pajak memiliki *p value* sebesar 0,298 (tidak signifikan) hal ini berarti tarif pajak tidak memberikan dampak yang signifikan pada persepsi *tax evasion*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yuliyanti *et al.* (2017) dan Ardyaksa & Kiswanto (2014). Tarif pajak yang rendah tidak dapat membuat Wajib Pajak untuk menghindari tindakan penggelapan pajak, tetapi jika ada celah maka akan tetap melakukannya. Hal ini sesuai dengan hasil analisis deskriptif, banyak dari narasumber yang tidak setuju jika penurunan tarif pungutan yang telah dijalankan akan menaikkan kemampuan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Pemerintah harus menetapkan tarif pajak dengan bijak agar kewajiban wajib pajaknya terpenuhi.

Variabel keadilan memiliki *p value* sebesar 0,000 (signifikan) hal ini berarti bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Damayanti *et al.* (2017); Yuliyanti *et al.* (2017); Annisa'ul & Cahyonowati (2014); dan Permatasari & Laksito (2013). Penggelapan pajak adalah dampak ketidakadilan yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Keadilan ialah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang karena bisa mempengaruhi dalam membayar pajak. Jika sesuatu yang Wajib Pajak bayarkan sebanding dengan apa yang didapatkan maka Wajib Pajak akan tertib dalam membayarkan pajaknya (McGee, 2006). Wajib pajak yang merasa adil dalam perhitungan pajak maka akan berusaha untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Rahayu & Majdid (2018) menyatakan bahwa mewujudkan keadilan pajak adalah dasar permasalahan pajak. Terdapat tiga aspek keadilan yang penting untuk diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu: keadilan dalam menyusun Undang-Undang Pajak. Masyarakat akan dapat melihat keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kepentingan wajib pajak dengan melihat proses dan hasil akhir dalam pembuatan Undang-Undang Pajak yang berlaku; kedua, keadilan dalam menerapkan ketentuan pajak dengan memahami dan mengaplikasikan asas-asas pemungutan pajak dengan baik; ketiga, keadilan dalam menggunakan uang yang didapat dari hasil pungutan pajak. Uang pajak harus digunakan secara adil karena pembayaran pajak tidak terlihat hubungan timbal balik yang seimbang ketika pajak sudah dibayarkan.

5. Simpulan, Saran dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan dua variabel lain nya yaitu *self assessment system* dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam metode penelitian yang hanya menggunakan kuesioner dimana kemungkinan jawaban yang dituliskan tidak sama dengan realita sesungguhnya. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan wawancara langsung agar data yang didapat lebih terpercaya dan dapat mengawasi responden apakah kuesioner benar-benar diisi oleh orang yang dituju.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam sampel yang hanya berfokus pada 25 OPD di Kabupaten Bantul. Penelitian selanjutnya bisa memperbanyak sampel agar data yang didapat lebih banyak dan dapat meminimalisir bias. Selain itu, penelitian ini hanya

menggunakan empat variabel yaitu pemahaman perpajakan, *self assessment system*, tarif pajak, dan keadilan. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain dikarenakan masih banyak faktor yang mempengaruhi tindakan pengelapan pajak seperti teknologi dan informasi perpajakan, kecurangan, dan ketepatan pengalokasian.

Daftar Pustaka

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107-122.
- Annisa'ul H, M., & Cahyonowati, N. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1-7.
- Ardi, D.M., Trimurti., & Suhendro. (2016). Pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di kota Surakarta. *Journal of Economica and Economic Education*, 4(2), 177-191.
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. *Accounting analysis journal*, 3(4), 475-484.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.
- Ayu, R., Dyah, S., & Hastuti, R. (2009). Persepsi Wajib Pajak: Dampak pertentangan diametral pada tax evasion Wajib Pajak dalam aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal (Studi Wajib Pajak orang pribadi). *Kajian akuntansi*, 1(1), 1-12.
- Budiarto, D. S., Yennisa., & Widyaningrum, R. (2018) Does Religiosity Improve Tax Compliance? An empirical research based from gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10 (1), 82-90
- Damayanti, D., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). Pengaruh keadilan, self assessment system, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak (studi empiris pada Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 426-440.
- Dewi, T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534-2564.
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1565-1578.
- Fjeldstad, O.-H. (2013). *Taxation and Development: A review of donor support to strengthen tax systems in developing countries* (9292305875).
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Accounting analysis journal*, 3(4), 543-552.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.

- Ismadiani, N., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2019). Pengaruh keadilan dan self assessment system terhadap tindakan penggelapan pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 754-759.
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. *Journal of accounting literature*, 5(1), 125-165.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1-12.
- Mardiasmo, M. (2009). *Perpajakan*. (Edisi Revisi 2009). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marliana. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (Studi empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, 2(2), 151-168.
- McGee, R. W. (2006). Three views on the ethics of tax evasion. *Journal of Business Ethics*, 67(1), 15-35.
- Mustofa, F. A. (2016). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu setelah diberlakukannya peratu. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1), 1-14.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi tax evasion melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah (Studi empiris pada Wajib Pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 455-464.
- Purwanto, P., Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap tax evasion (Studi kasus pada Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 10(2), 139-146.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1112-1140.
- Rahayu, I. S., & Majdid, S. (2018). Pengaruh tarif pajak, ketetapan pengalokasian pajak dan keadilan pajak terhadap tax evasion oleh Wajib Pajak orang pribadi. *Majalah Sainstekes* 5(2), 091-100.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmadi, W., & Zulaikha. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-9.
- Safitri, A. (2018). Pengaruh religiusitas dan detection rate terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-14.
- Salam, N. F., & Rahim, S. (2016). Pengaruh ketentuan tarif pajak badan ketepatan pemanfaatan pajak dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 6(1), 35-50.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer: konsep dasar perpajakan Indonesia*: Graha Ilmu.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Barat: Indeks, PT.

- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-faktor persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 5(1), 1-10.
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, dan keadilan sistem terhadap penggelapan pajak: Studi empiris pada WPOP yang melakukan usaha di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893-904.
- Wahyuni, A. (2011). Tax evasion: dampak dari self assessment system. *JINAH (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika)*, 1(1), 1-8.
- Waluyo. (2011). *perpajakan indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlala, S. (2017). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak badan mengenai penggelapan pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 847-855.